

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini masih hangat untuk di perbincangkan, dengan masih adanya kasus-kasus buruk tentang kualitas laporan keuangan di Indonesia. Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa dengan masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Simanjuntak, 2019).

Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui kinerja keuangan yang telah dicapai oleh pemerintah selama masa anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota, seluruh badan dinas dan instansi pemerintah pun harus mampu membuat laporan keuangan. Menurut Darmawan dan Darwanis (2014) pemerintah daerah selaku tokoh utama dalam penyajian laporan keuangan yang akan dipublikasi ke masyarakat harus bersifat terbuka dan memiliki kebenaran yang valid sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahaminya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pelaporan yang dapat bersifat akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat

dipercaya dalam rangka memuaskan kebutuhan para pengguna laporan keuangan dan dapat menciptakan otonomi daerah yang akurat.

Menurut penelitian Simanjuntak (2019) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh banyak faktor, laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan anggaran saldo lebih, laporan arus kas, laporan operasional, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah”. Dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa, laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Menurut Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa SIMDA merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Pada penelitian Abidin (2018), Simanjuntak (2019), dan Runtuwene (2017) menunjukkan bahwa implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Abidin (2018) dalam pengelolaan keuangan yang baik, organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, dan mempunyai

latar belakang pendidikan akuntansi, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Pada penelitian yang dilakukan Abidin (2018) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada Suyono (2016) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu penerapan standar akuntansi. Runtuwene (2017) menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan salah satu program reformasi birokrasi, dimana pemerintah yang selama ini kurang akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan, dituntut menyampaikan laporan keuangan yang komprehensif dan handal kepada seluruh pengguna. Menurut Suyono (2016) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Pada penelitian Abidin (2018), Runtuwene (2017), Endianto (2017) dan Djalil (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Gamayuni (2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor empat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu peran internal audit. Endianto (2017) menyatakan bahwa pengawasan internal pemerintah (audit internal) pada kementerian negara/ lembaga/ pimpinan/ gubernur/ bupati/ walikota kepada pihak-pihak terkait. Tujuan review atas laporan keuangan pemerintah daerah ialah memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Peran internal audit dalam hal ini adalah sebagai *quality assurance* (penjamin mutu). Pada penelitian Endianto (2017), Gamayuni (2018), Yadiati (2017), Umar (2018) dan Rahmatika (2014) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Suyono (2016) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh M. Khoirul, Affifudin dan Junaidi (2018) yang meneliti tentang pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah (simda), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi dan peran internal audit terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan M. Khoirul, Affifudin dan Junaidi (2018) sebelumnya adalah pertama adalah variabel penelitian, dalam penelitian ini terdapat penambahan satu variabel independen yaitu peran internal audit atas dasar saran dari penelitian Abidin (2018) dan dasar dari penelitian lain yang menggunakan variabel tersebut yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Variabel tersebut digunakan dalam penelitian Endianto (2017) yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penelitian pada Gamayuni (2018), Yadiati (2017), Umar (2018) dan Rahmatika (2014) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Suyono (2016) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga dilakukan di lokasi yang berbeda. Pada penelitian terdahulu dilakukan di Kota Malang dan menyarankan untuk memperluas objek penelitian. Maka penelitian memilih lokasi penelitian ini di Kabupaten yang ada di eks Karisidenan Pati. Maka dari itu dari tiga perbedaan penelitian ingin menguji kembali terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada OPD Se-Eks Karisidenan Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penulis membatasi penelitian ini agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan .

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini membahas tentang Kualitas Laporan Keuangan
2. Dalam penelitian ini variabel yang diambil adalah Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Peran Internal Audit. Dan studi diambil pada OPD di Kabupaten se-Eks Karisidenan Pati.

1.3 Perumusan Masalah

1. Apakah implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. keuangan?
4. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Menambah referensi bagi pengembangan ilmu manajemen akuntansi melalui kajian pengaruh Implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), Kualitas sumber daya manusia, Penerapan standar akuntansi dan Peran internal audit terhadap Kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Bagi OPD di wilayah kabupaten se-Eks Karisidenan Pati, sebagai informasi tentang proses implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi dan peran internal audit dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.